

L K J I P

LAPORAN KIINERJA INSTANSI PEPERINTAH

2020



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Pattimura No. 2 Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat karunia-Nya penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2020 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat diselesaikan. LKJIP disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKJIP disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Semoga LKJIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja pada masa mendatang.

Pekanbaru, Februari 2021

KEPALA DINAS

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU.

drh. RAHMAT SETIYAWAN

Pembina Tk.I

NIP. 19700304 199903 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya dapat terus ditingkatkan.

LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini. Analisa ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan sasaran dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah berhasil dicapai. Dari dua Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 menunjukkan bahwa capaian indikator angka produksi daging ruminansia lokal dikategorikan tinggi dengan persentase angka produksi daging ruminansia lokal 81,85%, dan capaian indikator persentase status kesehatan hewan termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan persentase 98,84%.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. ke depan. Tantangan tersebut antara lain :

- Pandemi Covid 19 menyebabkan turunnya daya beli masyarakat sehingga berpengaruh terhadap permintaan daging yang secara langsung mempengaruhi jumlah pemotongan ternak dan berimbas pada turunnya produksi daging.
- Usaha peternakan sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah (penguasaan teknologi dan informasi peternakan yang kurang). Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif sehingga produktivitas tidak optimal.
- Terbatasnya ketersediaan pakan ternak berkualitas. Budidaya bahan baku pakan dan pengolahan pakan masih terbatas hanya skala rumah tangga oleh masyarakat peternak lokal. Tingginya harga bahan baku tambahan pakan seperti obat, vitamin dan mineral yang tidak bisa dijangkau secara langsung oleh peternak. Peternak lokal dengan keterbatasan biaya pengadaan pakan hanya mengambil langkah alternatif lain yaitu dengan tetap mempertahankan cara pengolahan pakan secara tradisional dan konvensional tanpa didukung pengetahuan dan teknologi terkini dan modern.
- Adanya ancaman penyakit menular yang berpotensi menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya (Zoonosis).

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	2
1.3. Fungsi dan Tugas	10
1.4. Aspek Strategis Organisasi	13
1.5. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) Organisasi.....	13
1.8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Perencanaan Strategis	17
2.2. Perjanjian Kinerja	21
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2020.....	24
2.4. Instrumen Pendukung	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 . Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	29
3.2. Realisasi Anggaran.....	53
BAB IV. PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan.....	57
4.2. Saran Tindak Lanjut	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan (orang).....	5
Tabel 1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.4. Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang dan UPT Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020.....	7
Tabel 1.5. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020.....	8
Tabel 1.7. Pemetaan Permasalahan Utama Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Riau	15
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2020	18
Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2020	19
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020	21
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019	22
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel 3.2. Capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020.....	30
Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019.....	31
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra.....	32
Tabel 3.5. Produksi Daging Ruminansia (dari ternak lokal dan dari luar daerah)...	35
Tabel 3.6. Target Dan Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Untuk Peningkatan Populasi Dan Produksi	36
Tabel 3.7. Pelayanan Kesehatan Hewan	42

Tabel 3.8. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis ke-1	47
Tabel 3.9. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2.....	49
Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020	54
Tabel 3.11. Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi.....	4
Gambar 1.2. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin.	5
Gambar 1.3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	6
Gambar 1.4. Grafik Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan (orang)	7
Gambar 1.5. Grafik Jumlah Pegawai pada Masing-Masing Bidang/UPT	8
Gambar 1.6. Grafik Jumlah Pejabat Fungsional tertentu.....	8
Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI	23
Gambar 2.2. Tampilan aplikasi ISIKHNAS di Telepon Genggam pada Petugas Lapangan	25
Gambar 2.3. Tampilan Isikhnas di layar komputer	27
Gambar 3.1. Grafik Persentase Status Kesehatan Hewan	32
Gambar 3.2. Grafik Produksi Daging Ruminansia	34
Gambar 3.3. Grafik Populasi Ternak Ruminansia	35
Gambar 3.4. Grafik Vaksinasi Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2018-2020	43
Gambar 3.5. Penerimaan Sertifikat ISO 9001 UPT. Inseminasi Buatan Ternak	51
Gambar 3.6. Pengecekan Semen Beku yang selanjutnya di salurkan ke Kabupaten/kota untuk Inseminasi Buatan	51
Gambar 3.7. Pelaksanaan Vaksinasi Rabies Gratis dalam rangka <i>World Rabies Day</i>	52
Gambar 3.8. Pengambilan Sampel RBT	52

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governace* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Riau dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahun 2020 dan juga Rencana Strategis tahun 2019-2024. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Riau di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2. Mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi

A. Dasar Pembentukan Organisasi

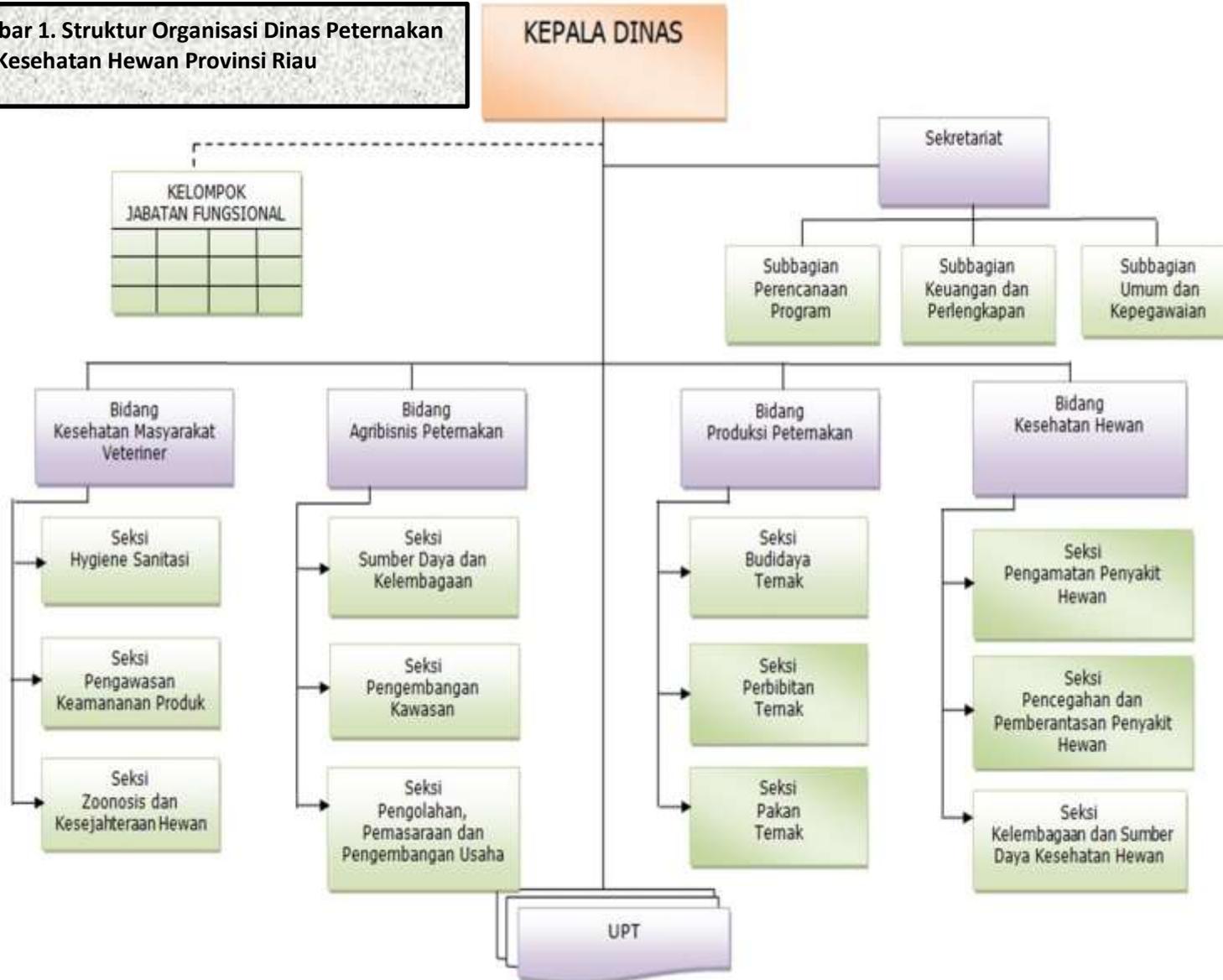
Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Keberadaan Dinas Peternakan Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, diharapkan dapat membantu Gubernur membawa Riau melakukan pembangunan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai struktur organisasi seperti pada Gambar 1. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Perencanaan Program; Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Produksi Peternakan, yang terdiri atas : Seksi Perbibitan Ternak; Seksi Pakan Ternak; serta Seksi Budidaya Ternak.
3. Bidang Agribisnis Peternakan, yang terdiri atas : Seksi Pengembangan Kawasan; Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan; serta Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha.
4. Bidang Kesehatan Hewan, yang terdiri atas : Seksi Seksi Pengamatan Penyakit Hewan; Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; serta Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan.
5. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang terdiri atas : Seksi Hygiene Sanitasi; Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan; serta Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.
6. UPT Rumah Sakit Hewan, yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Pelayanan Medik Veteriner.
7. UPT Inseminasi Buatan Ternak, yang terdiri atas : Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
8. UPT Laboratorium Pakan Ternak, yang terdiri atas : Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Pembibitan Hijauan Pakan Ternak dan Pengujian Pakan Ternak
9. Kelompok Pejabat Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

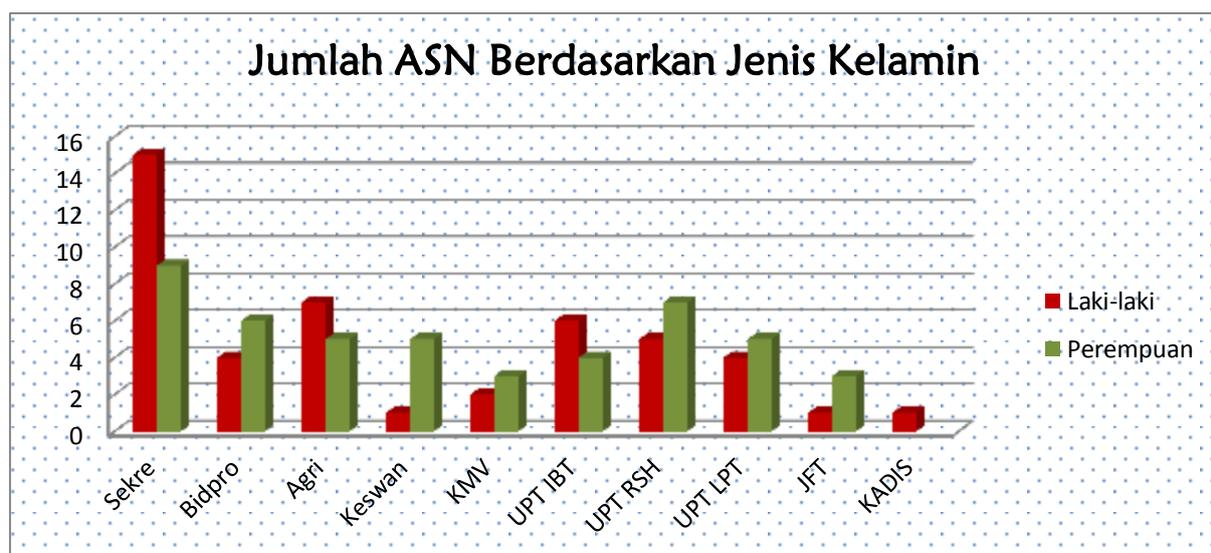


C. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada Tahun 2020 memiliki sumber daya manusia aparatur secara keseluruhan termasuk pada UPT sebanyak 317 orang yang terdiri dari 33 orang pejabat struktural, 15 orang pejabat fungsional tertentu, 45 orang pejabat fungsional umum serta 224 orang tenaga non PNS yang terdiri dari 43 orang di Sekretariat dan Bidang, 104 orang di UPT dan 77 orang pendamping yang terdapat di setiap Kabupaten/Kota. Komposisi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, tingkat pendidikan, golongan maupun wilayah kerja dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

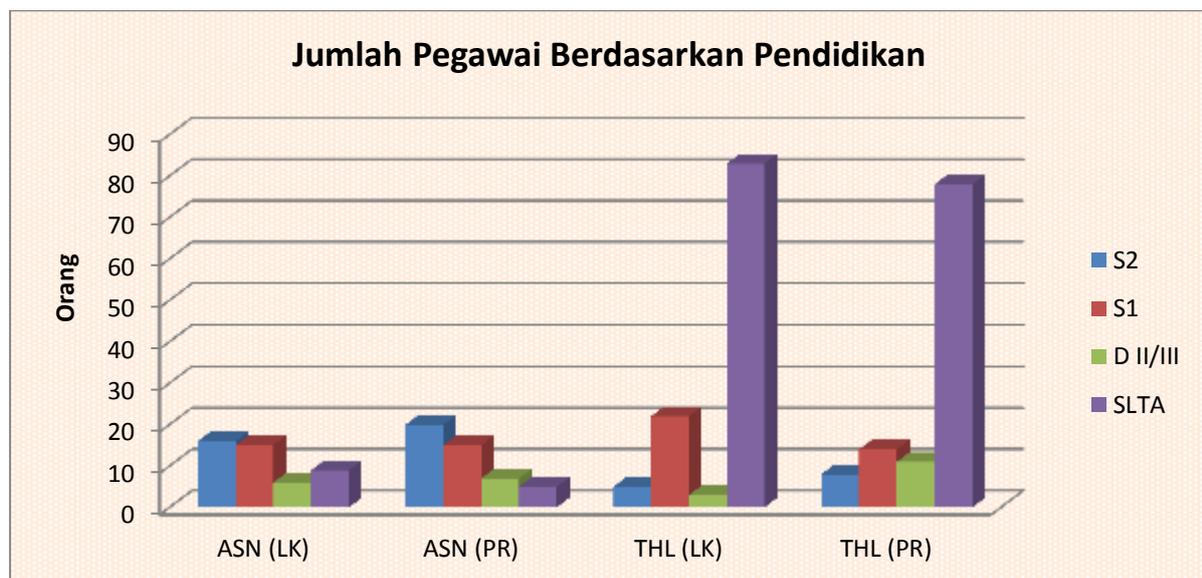
No	Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	15	9	24
2	Produksi Peternakan	4	6	10
3	Agribisnis Peternakan	7	5	12
4	Kesehatan Hewan	1	5	6
5	Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	3	5
6	UPT IBT	6	4	10
7	UPT Rumah Sakit Hewan	5	7	12
8	UPT Pengembangan Ternak Dan Pakan	4	5	9
9	Fungsional Madya	1	3	4
10	Kepala Dinas	1	-	1
Total		46	47	93



Gambar 1.2. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan (Orang)

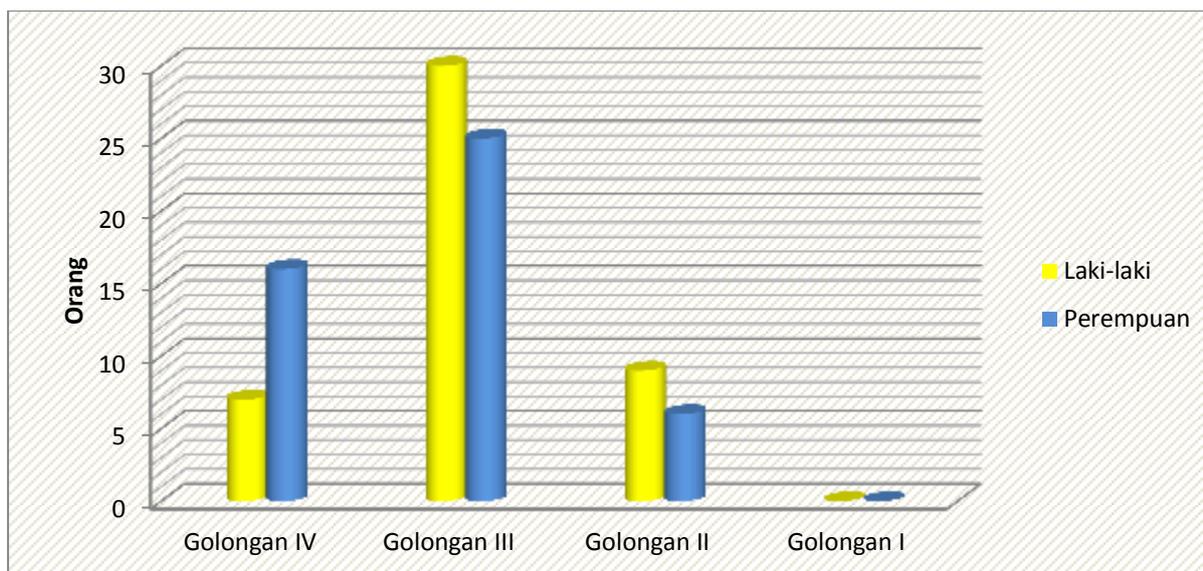
No	Pendidikan	ASN		THL		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	S2	16	20	5	8	49
2	S1	15	15	22	14	66
3	D II/III	6	7	3	11	27
4	SLTA	9	5	83	78	175
5	SLTP	-	-	-	-	0
6	SD	-	-	-	-	0
Total		46	47	113	111	317



Gambar 1.3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan (Orang)

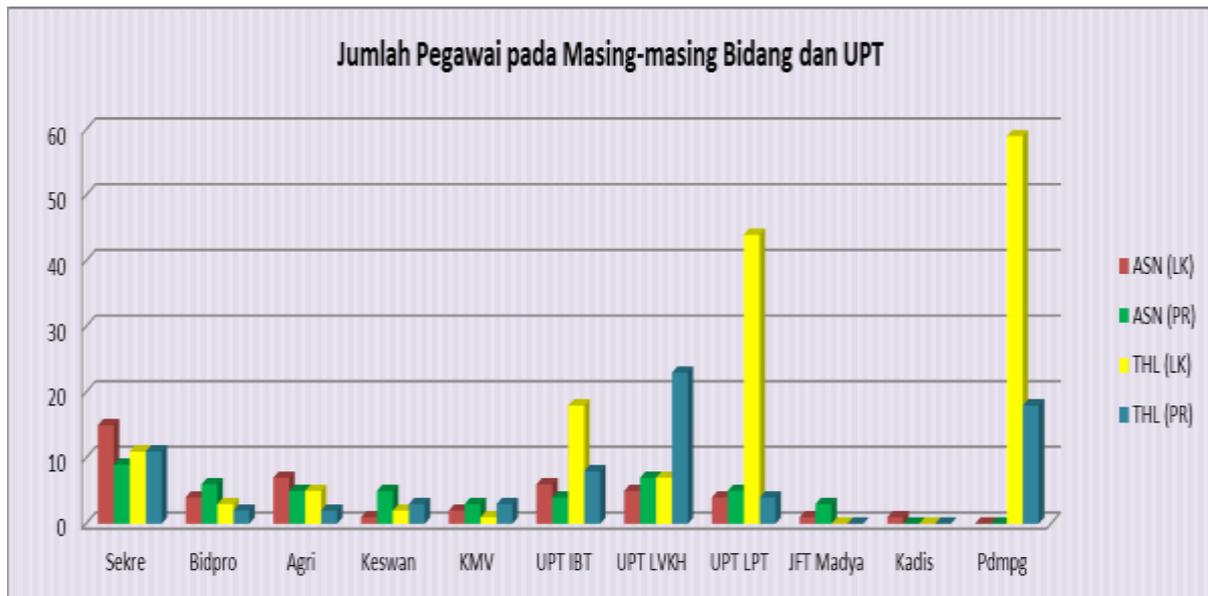
No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	7	16	23
2	Golongan III	30	25	55
3	Golongan II	9	6	15
4	Golongan I	-	-	-
Total				93



Gambar 1.4. Grafik Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan (Orang)

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai pada Masing-masing Bidang dan UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 (Orang)

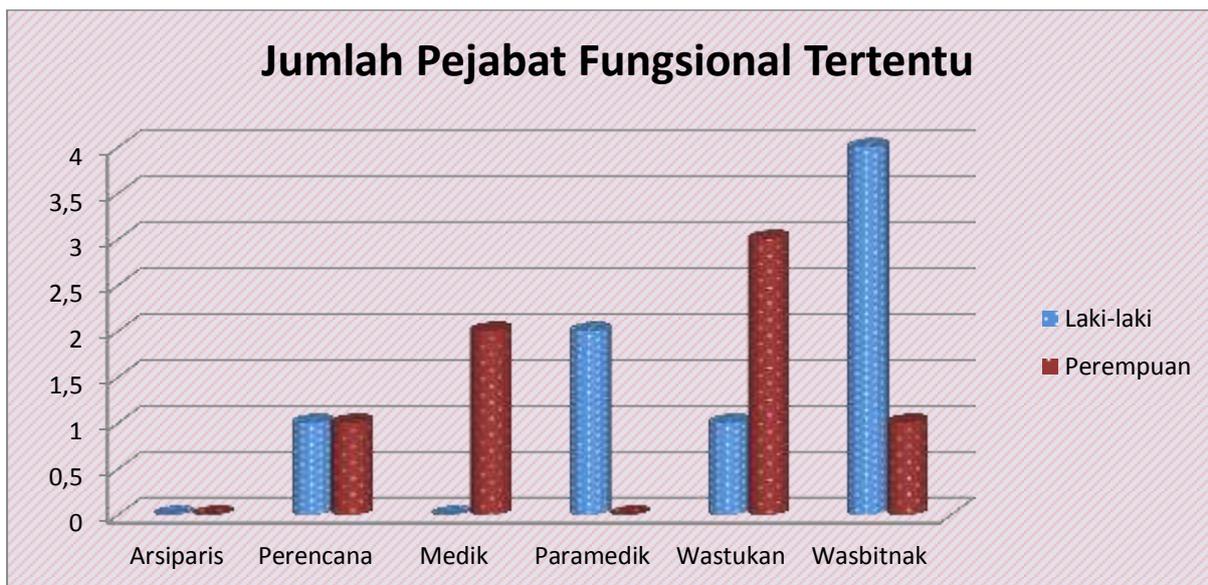
No	Bidang/UPT	ASN		THL		Jumlah
		LK	PR	LK	PR	
1	Sekretariat	15	9	11	11	46
2	Produksi Peternakan	4	6	3	2	15
3	Agribisnis Peternakan	7	5	5	2	19
4	Kesehatan Hewan	1	5	2	3	11
5	Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	3	1	3	9
6	Upt Ibd	6	4	18	8	36
7	Upt Lvkh	5	7	7	23	42
8	Upt Laboratorium Pakan Ternak	4	5	44	4	57
9	Fungsional Madya	1	3	-	-	4
10	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
11	Honoror Pendamping Agribisnis	-	-	59	18	77
Total		46	47	150	74	317



Gambar 1.5. Grafik Jumlah Pegawai pada Masing-Masing Bidang/UPT

Tabel 1.5. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 (Orang)

No	Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Fungsional Arsiparis	-	-	-
2	Fungsional Perencana	1	1	2
3	Fungsional Medik	-	2	2
4	Fungsional Paramedik	2	0	2
5	Fungsional Pengawas Mutu Pakan	1	3	4
6	Fungsional Pengawas Bibit Ternak	4	1	5
Total		8	7	15



Gambar 1.6. Grafik Jumlah Pejabat Fungsional tertentu

D. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memiliki aset mulai dari tanah, gedung kantor, sarana transportasi, sarana perkantoran dan lain-lain tersebar di bidang dan UPT. Fasilitas yang tersedia pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari adalah sebagai berikut:

1. Ruang Rapat:
 - a. Ruang Rapat Besar : 1 Unit
 - b. Ruang Rapat kecil : 2 Unit
2. Tempat Upacara dan Apel Pagi dengan ukuran luas 300 m² (30m x 10m)
3. Tempat Parkir Kendaraan Bermotor:
 - a. Gedung Kantor : 1 Unit, dengan luas : 400 m²
 - b. Gedung Plaza Ternak : 2 Unit, dengan luas : 500 m²
4. Kamar Kecil/Toilet:
 - a. Gedung Dinas : 6 Unit
 - b. Gedung UPT RSH : 4 Unit
 - c. Gedung UPT IBT : 2 unit
 - d. Gedung Laboratorium UPT RSH : 4 unit
 - e. Gedung UPT Laboratorium Pakan : 2 unit
5. Halaman Kantor:
 - a. Gedung Dinas : 300 m²
 - b. Gedung UPT RSH : 400 m²
 - c. Gedung UPT IBT : 200 m²
6. Daya Listrik:
 - a. Gedung kantor : 80 A (53.000 VA)
 - b. Gedung Lab UPT RSH : 1) 100 A (66.000 VA)
2) 80 A (53.000 VA)
 - c. Gedung UPT RSH : 50 A (33.000 VA)
 - d. Gedung UPT IBT : 60 A (41.500 VA)
7. Jaringan Telepon Kabel :
 - a. Gedung Kantor : 2 Unit (no tlp: 0761 - 43441 dan 43442)
 - b. Gedung UPT RSH : 1 Unit (no tlp: 0761 – 24170)
8. Jaringan/Layanan Internet :
 - a. Gedung Kantor : 2 Unit

- b. Gedung UPT RSH : 1 Unit
9. Kendaraan Dinas
- a. Mobil Jabatan : 8 unit
 - b. Mobil Operasional : 9 unit
 - c. Roda 2 : 27 unit
 - d. Roda 3 : 3 unit

1.3. Fungsi dan Tugas

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum,

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Produksi Peternakan

Kepala Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Budidaya Ternak, Seksi Perbibitan Ternak, dan Seksi Pakan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Produksi Peternakan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Produksi Peternakan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Kesehatan Hewan

Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengamatan Penyakit Hewan, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan serta Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kesehatan Hewan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesehatan Hewan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Higiene Sanitasi, Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan serta Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Agribisnis Peternakan

Kepala Bidang Agribisnis Peternakan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan, Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan, dan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Agribisnis Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Agribisnis Peternakan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Agribisnis Peternakan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan. Untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berperan dalam mendukung misi ke tiga yakni mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing dengan sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan Pendapatan dengan indikator Nilai PDRB ADHK.

Sub sektor peternakan telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Disamping itu, kontribusi sub sektor peternakan yaitu pada penyediaan bahan pangan asal hewan dan bahan baku industri, serta ikut berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan riil masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan yang di pengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka Usaha peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan protein hewani, terutama daging. Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Riau tidak hanya menjamin ketersediaan produksi hasil ternak tapi juga menjamin standar mutu produk hasil ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Undang-undang No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa semua pemotongan hewan ternak harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan. Hal ini untuk menjamin standar mutu aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) tersebut.

Dalam pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan yang ASUH, perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak di Riau sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan terutama kawasan integrasi sapi-sawit dengan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada.

1.5. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Organisasi

Perkembangan produksi dan produktivitas beberapa komoditas peternakan selama beberapa tahun terakhir masih lamban. Produksi daging terutama produksi daging ruminansia masih sangat kurang bila dibandingkan

dengan kebutuhan daging dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Saat ini pemenuhan kebutuhan daging ruminansia terutama sapi masih dominan didatangkan dari luar. Pemenuhan kebutuhan daging ruminansia lokal masih dibawah 20% selebihnya merupakan ternak yang didatangkan dari luar dan dipotong di Provinsi Riau atau daging yang didatangkan dalam bentuk daging beku.

Rendahnya produksi daging ruminansia lokal di Provinsi Riau salah satunya dikarenakan jumlah populasi ternak yang masih sedikit. Peningkatan populasi ternak di Riau pada dasarnya masih relatif rendah perkembangannya, Hal tersebut terjadi disebabkan berbagai macam faktor seperti ketersediaan bibit ternak lokal yang masih sangat kurang, manajemen perkawinan belum optimal, penerapan teknologi tepat guna dilapangan masih minim, Good Farming Practice tidak diterapkan dengan baik, dan penataan kelembagaan peternakan belum optimal.

Komoditas peternakan dimana pelaku pemeliharaan ternak (produsen) sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif, menyebabkan produktivitas tidak optimal.

Hal lain yang menjadi permasalahan dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah upaya menekan penyakit ternak di Provinsi Riau, sampai saat ini masih merupakan persoalan yang masih dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Upaya pencegahan dengan vaksinasi, pemberantasan (eliminasi), pengawasan lalu lintas, sosialisasi dan koordinasi dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit ternak, namun kasus penyakit ternak masih saja terjadi.

Tabel 1.7. Pemetaan Permasalahan Utama Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Riau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Produksi Daging Ruminansia Lokal rendah	Jumlah populasi ternak ruminansia sedikit	Angka Kelahiran IB rendah
			Angka Kelahiran INKA rendah
			Jumlah bibit ternak terbatas
			Kualitas bibit ternak tidak unggul
			Kurang pakan berkualitas
		Skala usaha peternakan kecil	Terbatasnya modal usaha
			Akses permodalan usaha peternakan yang masih sulit bagi peternak
			Peternak belum berorientasi bisnis
		Kompetensi SDM Peternakan yang terbatas	Petugas pelayanan reproduksi belum terlatih
			Pengetahuan dan keterampilan Petugas Lapangan Teknis terbatas
			Minimnya pengetahuan peternak tentang teknik budidaya ternak
			Terbatasnya kemampuan peternak dalam mengelola kelembagaan petani
2	Keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan masih rendah	Pengendalian penyakit hewan menular belum optimal	Penyakit hewan belum terpantau dengan baik
			Pelayanan veteriner belum maksimal
			Minimnya sarana prasarana Puskesmas
		Pengawasan pangan asal ternak yang ASUH belum optimal	Penerapan NKV rendah
			Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM kesmavet
			Pengawasan peredaran pangan Asal Hewan belum optimal

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selama Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Aspek Strategis Organisasi, Permasalahan Utama Organisasi dan Sistematika Penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Renstra Dinas kabupaten/kota yang menangani bidang peternakan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, serta memperhatikan hasil evaluasi Kinerja Dinas Peternakan dan Kesejahteraan Hewan periode 2014 – 2019, serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang peternakan, baik pada tingkat global, nasional maupun regional.

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019-2024 merupakan acuan untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana Strategis yang disusun berangkat dari permasalahan Pokok Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang dirasakan pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat diringkas dalam poin-poin berikut:

1. Lambannya peningkatan produksi dan produktivitas ternak
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai
3. Kemampuan permodalan peternak dan akses peternak terhadap permodalan terbatas.
4. Industri hilir peternakan serta pemasarannya masih terbatas
5. Pemotongan ternak ruminansia betina produktif
6. Penyebaran penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (PHMS)
7. Adanya ancaman penyakit hewan menular (Rabies dan SE)
8. Kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur dan peternak belum memadai

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau periode 2019-2024, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai peran dalam mencapai sasaran dari Misi ke 3 Kepala Daerah yakni pada misi Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing. Dalam upaya pencapaian misi tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan tujuan dinas yakni **Memperkuat Pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan**. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi dan harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Sasaran Strategis sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Memperkuat Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Meningkatnya produksi daging	Angka produksi daging ruminansia lokal (ton)
		Meningkatnya status kesehatan hewan	Persentase Status kesehatan hewan (%)

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan 2 (dua) indikator sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, dalam Renstra Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)			
MISI 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing			
Tujuan : Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing			
Tujuan PD	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memperkuat Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1.1.Meningkatnya produksi daging	Peningkatan keberhasilan IB	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) - Pengembangan produksi semen beku dan cair - Pengembangan sarana dan prasarana IB ternak
		Peningkatan keberhasilan kawin alam	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan perbibitan ternak
		Peningkatan jumlah dan kualitas bibit ternak	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian pemotongan ternak betina produktif - Pengembangan perbibitan masyarakat - Pembinaan ternak ruminansia - Pengembangan agribisnis peternakan - Pembibitan dan perawatan ternak - Pemutakhiran data teknis peternakan dan kesehatan hewan - Pendistribusian ternak
		Pemenuhan kebutuhan pakan ternak	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pakan ternak - Pembangunan sarana dan prasarana Laboratorium Pakan ternak - Pengembangan dan penyediaan pakan ternak
		Peningkatan fasilitasi permodalan kelompok usaha peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Akses permodalan kelompok usaha peternakan - Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau - Pembinaan dan

			pengawasan kemitraan usaha peternakan
		Peningkatan agribisnis peternakan	- Peningkatan pemanfaatan limbah ternak sapi - Pengembangan kawasan peternakan
		Peningkatan penerapan NKV	- Pengawasan penerapan NKV - Pengawasan peredaran PAH
	1.2.Meningkatnya status kesehatan hewan	Pemantauan penyakit hewan	- Surveilans, pembinaan, monitoring dan evaluasi
		Peningkatan pelayanan veteriner	- Pengembangan sarana dan prasarana UPT
			- Pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak - Penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan PD	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan internal OPD	Peningkatan penerapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang unggul	Peningkatan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien
			Peningkatan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
			Peningkatan pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan secara akuntabel dan professional

2.1.3. Program Kegiatan

Rencana Program Kegiatan, dan indikator kinerja, sasaran kinerja serta pagu pendanaan indikatif pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam lima Tahun (periode 2019-2024) sudah disusun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Indikator Kinerja Program Utama dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024

PROGRAM UTAMA		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak sapi (ekor)
2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase angka kematian ternak (%)

Beberapa pengertian indikator yang perlu diperjelas adalah :

1. Populasi Ternak Sapi adalah jumlah populasi ternak sapi akhir tahun yang telah divalidasi.
2. Angka kematian ternak adalah angka kematian ternak selama tahun 2020 yang diperoleh dari analisis aplikasi ISIKHNAS (Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional)

Selain itu, Dinas Peternakan Provinsi Riau juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBN dalam bentuk Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.

2.2. Perjanjian Kinerja

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala perangkat Daerah dengan Kepala Daerah (Gubernur), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis.

Untuk Tahun 2020 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada awal tahun telah ditetapkan perjanjian kinerja namun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kondisi pergantian atau mutasi pejabat atau perubahan alokasi, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan. Sehubungan dengan pergantian Pejabat di lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan adanya perubahan target kinerja dan pagu anggaran Tahun 2020 maka perjanjian kinerja juga mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut ini:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET MURNI	TARGET PERUBAHAN
1	Meningkatnya produksi daging	Angka produksi daging ruminansia lokal	2.338,30 Ton	1.796 Ton
2	Meningkatnya status kesehatan hewan	Persentase status kesehatan hewan	95,2%	95,2%

Pada tahun 2020, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga menyepakati Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan dengan 15 indikator kinerja. Indikator dalam Perjanjian Kinerja tersebut juga mendukung tercapainya IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada sasaran meningkatnya produksi daging ruminansia lokal dan meningkatnya status Kesehatan hewan. Perjanjian Kinerja antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp. 4.976.394.000,- (Empat miliar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (10,42%); II (18,75%); III (29,17%); IV (37,50%); V (47,92%); VI (56,25%); VII (64,58%); VIII (75,00%); IX (83,33%); X (91,67%); XI (100%); dan XII (100%),
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran,
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN) sebesar Rp 17.985.000,-

II. Kinerja Tahunan

1. Target Kinerja Populasi dan Produksi

No	Komoditas	Populasi (ekor)	Produksi Daging (Karkas, Ton)	Produksi Telur (Ton)	Produksi Susu (Ton)
1.	Sapi potong	202.647	8.611		
2.	Sapi perah	100			56
3.	Kerbau	27.556	1.724		
4.	Kambing	242.414	705		
5.	Domba	29.015	28		
6.	Ayam pedaging	103.245.889	114.576		
7.	Ayam petelur	692.123		12.466	
8.	Ayam lokal	7.035.624	3.112	14.280	
9.	Itik	232.517	227	1.737	
10.	Babi	52.171	1.489		

2. Target Kinerja Kegiatan Prioritas

No	Uraian	Target
1.	Optimalisasi Reproduksi	32.580 Akseptor
2.	Pengembangan Hijauan Pakan	10 Ha
3.	Pencegahan dan Pangamanan PHMS	42.000 Dosis
4.	Penurunan Pematangan Betina Produktif	1 Lokasi
5.	Pemanfaatan KUR	Rp.11.590.000.000

Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020

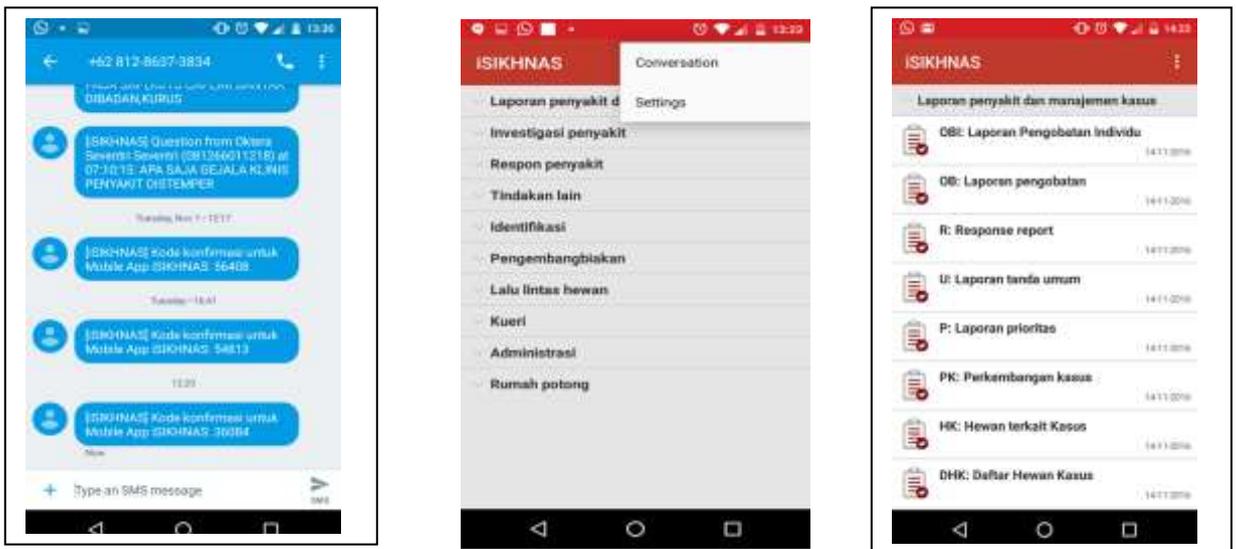
Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.48.741.334.529,61,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.18.321.469.961.,61,- dan Belanja Langsung Rp. 30.419.864.568,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi Rp.30.751.679.470 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.16.087.601.408,- dan Belanja Langsung Rp. 14.664.078.062,-.

Sedangkan pelaksanaan anggaran yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan APBN tahun anggaran 2020 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebesar Rp. 8.268.232.000,- yang dialokasikan untuk Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat yang mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 4.976.394.000,00 ,-

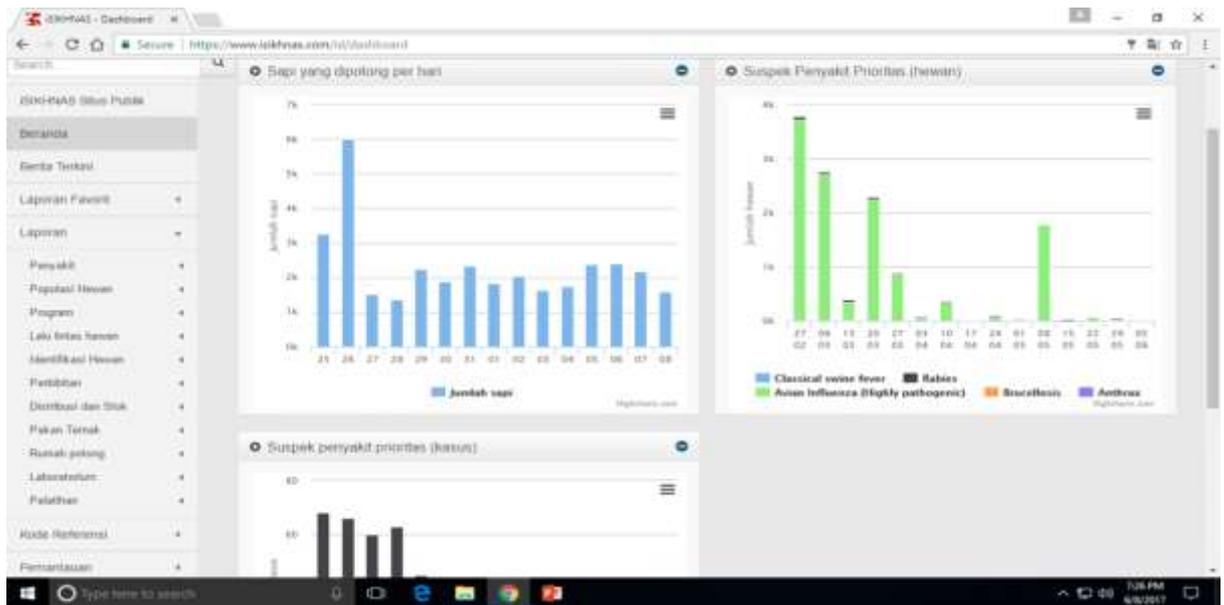
2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau didukung beberapa instrumen, yaitu dengan pengembangan aplikasi iSIKHNAS. iSIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan hewan Indonesia yang mutakhir. Sistem ini menggunakan teknologi sehari-hari dalam cara yang sederhana namun cerdas untuk mengumpulkan data dari Petugas lapangan dan dengan segera menyediakannya bagi para pemangku kepentingan dalam bentuk yang bermakna dan dapat segera dimanfaatkan. iSIKHNAS menggunakan pesan SMS dari telepon genggam Petugas Lapangan yang melaporkan sewaktu selesai melakukan pelayanan dalam bentuk pengamatan, pengobatan, pelayanan inseminasi Buatan, Pemeriksaan kebuntingan, pelaporan kelahiran dan lain-lain. Data yang sudah dikirim dari HP Petugas Lapangan masuk ke system aplikasi iSIKHNAS dan membuat data dapat dilihat dan dianalisis dengan cara-cara yang mudah bagi pengguna untuk siapa pun yang memerlukannya. Sistem yang cerdas dan otomatis akan memastikan bahwa data dimasukkan secara akurat, laporan dikirimkan secara otomatis, dan terdapat akses yang mudah kepada data, analisis rutin yang terprogram, dan, yang sangat penting, sistem peringatan bagi staf yang perlu merespon laporan

penyakit. iSIKHNAS akan memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi, guna membuat berbagai sistem tersebut lebih efisien dan terjangkau bagi lebih banyak pengguna. Dengan menggunakan iSIKHNAS, kita akan dapat menghubungkan data laboratorium dengan laporan penyakit, peta dengan data lalu-lintas hewan atau laporan wabah, data rumah potong dengan data produksi dan populasi, dan semua ini dilakukan secara otomatis. Hal ini sangat membantu para pengambil kebijakan di berbagai tingkat, juga baik bagi semua orang yang bekerja dalam bidang kesehatan hewan.



Gambar 2.2. Tampilan aplikasi iSIKHNAS di Telepon Genggam pada Petugas Lapangan



Gambar 2.3. Tampilan iSHIKHNAS di layar komputer

Disamping itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga memanfaatkan aplikasi pendukung untuk monitoring dan evaluasi berupa Sistem Informasi Pengendalian (<http://monev.riau.go.id>), merupakan sistem aplikasi yang disusun oleh Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Riau guna mendukung efektifitas dari proses monitoring dan evaluasi. Kegiatan Monitoring dan evaluasi dapat menjadi instrumen pendukung di dalam proses verifikasi dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan.

Perencanaan Program/Kegiatan APBD Tahun 2019 juga dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi perencanaan yang disusun oleh Bappeda Provinsi Riau juga sangat membantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Riau dalam melaksanakan proses perencanaan. Penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja menggunakan Aplikasi Perencanaan i-planning, sehingga kesesuaian antara sasaran, indikator, hingga Program/Kegiatan dapat disusun dengan efektif.

Informasi yang akurat dan mudah serta cepat untuk diakses sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam penyampaian informasi kepada masyarakat telah menggunakan berbagai media informasi untuk mendukung dinamika kelembagaan, seperti brosur, leaflet, bulletin, ekspose dan media massa lainnya. Tetapi dalam perkembangannya, penggunaan berbagai media tersebut dipandang masih kurang dikarenakan semakin tidak terbatasnya

ruang dan waktu untuk mawadahi perkembangan informasi tersebut. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mengelola satu buah website, yaitu : <http://dispkh.riau.go.id>

Pembuatan website ini adalah merupakan suatu upaya untuk menjembatani informasi yang semakin tidak terbatas serta untuk menuju penerapan E-Government pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, yaitu sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang *E-Government*, yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Secara umum website tersebut memiliki fungsi untuk memberikan informasi dinas seperti profil dinas, informasi dinas, data statistik pertanian, teknologi pertanian, kebijakan pertanian serta update harga pasar.

Hadirnya website ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan layanan masyarakat Riau khususnya masyarakat peternak dan pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan peternakan. Informasi yang disediakan oleh dinas di dalam website bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya, masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif untuk memberikan ide, masukan atau aduan untuk meningkatkan kualitas pembangunan peternakan di Riau.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2020 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. Hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja mencakup :

- Realisasi kinerja sasaran yang merupakan tingkat capaian dari masing-masing sasaran indikator kinerja
- Persentase pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian dari target masing-masing indikator kinerja.

Dengan penjelasan persentase pencapaian kinerja sebagai berikut :

- (1). Untuk indikator Angka produksi daging ruminansia lokal, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.
- (2). Pada indikator jumlah persentase status Kesehatan hewan, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik.

3.1.1. Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2020

Pengukuran capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.2. Capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET MURNI	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI PENILAIAN
1	Meningkatnya produksi daging	Angka produksi daging ruminansia lokal	2.338,3 Ton	1.796 Ton	1.470 Ton*	81,85%	Tinggi
2	Meingkatnya status kesehatan hewan	Persentase status kesehatan hewan	95,2%	95,2%	94,10%	98,84%	Sangat Tinggi

*Angka sementara

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2020 untuk sasaran strategis I : Meningkatnya produksi daging dengan indikator Angka Produksi Daging Ruminansia Lokal menunjukkan bahwa kinerjanya belum mencapai target, namun sudah dikategorikan pada kategori tinggi dengan

capaian kinerja 81,85%. Produksi daging ruminansia lokal pada tahun 2020 walaupun targetnya sudah diturunkan menjadi 1.796 ton dari awalnya 2.338,3 ton sebagai akibat kondisi ekonomi yang kurang mendukung karena pandemi covid19 dan adanya perubahan anggaran, namun penyesuaian target tersebut tetap tidak dapat dicapai. hanya dapat mencapai 1.470 Ton, Angka ini masih dapat berubah karena data yang ada merupakan data sementara. Selanjutnya akan dilakukan validasi dengan petugas didaerah pada bulan April 2020.

Pada sasaran strategis II : Meningkatnya status kesehatan hewan dengan indikator persentase status kesehatan hewan, realisasinya 94,10% dengan capaian kinerjanya mencapai 98,84% dengan kategori capaian kinerja Sangat Tinggi.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

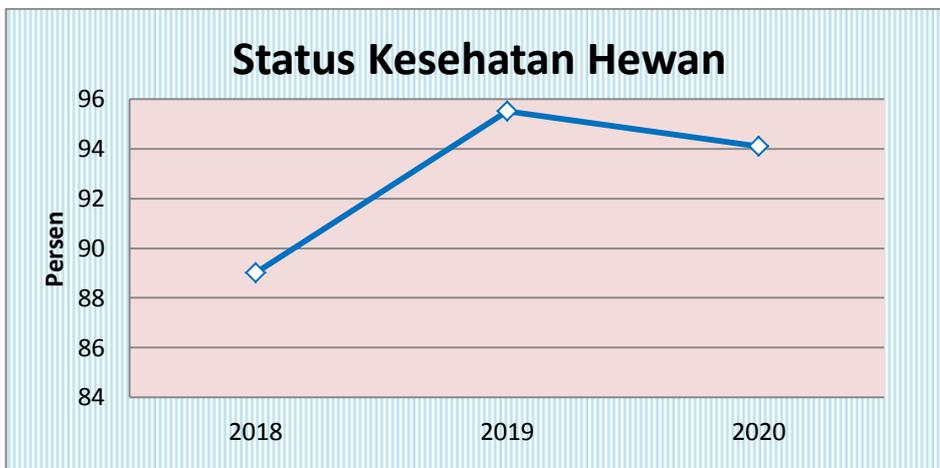
Realisasi tahun 2020 tidak terlepas dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Membandingkan realisasi saat ini dengan tahun sebelumnya berguna untuk melihat pertumbuhan capaian dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN KINERJA 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN KINERJA	% PENINGKATAN/PENURUNAN
1	Meningkatnya produksi daging	Angka produksi daging ruminansia lokal (Ton)	2.253,7 ton	1.089 Ton	48,32%	1.796 Ton	1.470 Ton*	81,85%	34,99%
2	Meningkatnya status kesehatan hewan	Persentase status kesehatan hewan (%)	94,5	95,5	101,06%	95,2	94,10	98,84%	-1,46%

Dari tabel 3.3. dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 untuk indikator angka produksi daging ruminansia lokal lebih tinggi bila dibandingkan dengan produksi daging ruminansia lokal pada tahun 2019 dengan kenaikan 34,99%. Penghitungan data produksi daging ruminansia lokal didapat dari data pemotongan ternak dikali dengan berat karkas sapi.

Sedangkan pada sasaran meningkatnya status kesehatan hewan dengan indikator persentase status kesehatan hewan capaian tahun 2020 lebih rendah dibanding tahun 2019, dengan penurunan sekitar 1,46%.



Gambar 3.1. Grafik Persentase Status Kesehatan Hewan

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa tahun 2018 persentase status kesehatan hewan sebesar 89% dan pada tahun 2019 naik mencapai 95,5% dan tahun 2020 turun sedikit menjadi 94,1%.

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan Target Renstra OPD

Untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian target renstra, maka dilakukan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2020 dengan target akhir renstra yakni target tahun 2024. Capaian renstra untuk indikator produksi daging ruminansia lokal dan persentase status Kesehatan hewan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel.3.4.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2020	Capaian tahun 2020 terhadap target akhir renstra
1	Meningkatnya produksi daging	Angka produksi daging ruminansia lokal (Ton)	3.134,76 ton	1.470 Ton*	46,89%
2	Meingkatnya status kesehatan	Persentase status	98,0%	94,10%	96,33%

	hewan	kesehatan hewan (%)			
--	-------	---------------------	--	--	--

Dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa capaian renstra untuk indikator produksi daging ruminansia lokal adalah sebesar 46,89% sampai dengan tahun 2020, sedangkan untuk indikator status kesehatan hewan capaian mencapai 96,33%. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau optimis akan dapat mencapai target akhir renstra pada tahun-tahun berikutnya mengingat tahun 2020 merupakan tahun pertama penerapan renstra periode 2019-2024 sehingga masih ada waktu maksimal 4 tahun lagi untuk mencapai target akhir renstra.

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

3.1.4.1. INDIKATOR ANGKA PRODUKSI DAGING RUMINANSIA LOKAL

Untuk mengukur Sasaran Strategis I yakni meningkatnya produksi daging digunakan indikator angka Produksi daging ruminansia lokal. Capaian target produksi daging ruminansia lokal pada tahun 2020 sesuai tabel 3.2 adalah sebesar 81,85% . Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan namun sudah termasuk kategori penilaian kinerja yang tinggi. Produksi daging ruminansia lokal yang dihitung adalah daging yang berasal dari pemotongan sapi, kerbau dan kambing yang dibudidayakan di wilayah Provinsi Riau, dan pemotongannya dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) serta tercatat pada iSIKHNAS.

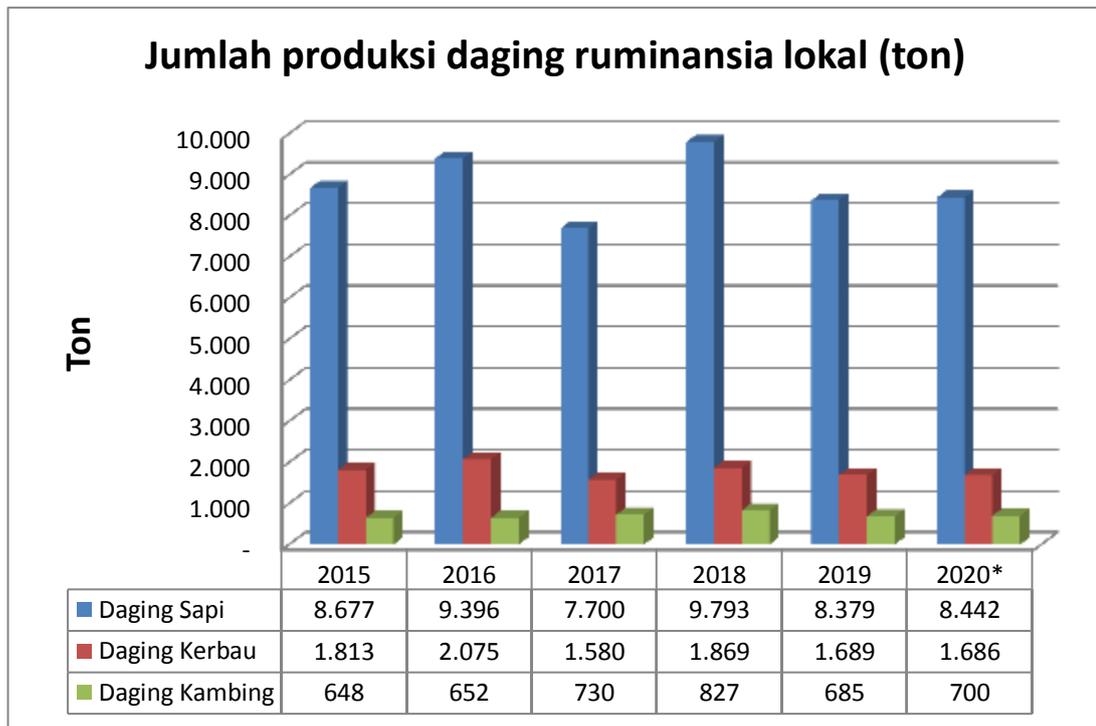
Pada indikator kinerja angka produksi daging ruminansia lokal yang dihitung hanya dari penghitungan jumlah pemotongan ternak di RPH yang dilaporkan di iSIKHNAS dikalikan dengan berat karkas.

Bila dibanding dengan tahun 2019, produksi daging tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 34,99%. Namun peningkatan ini belum mencapai target produksi daging yang sudah ditetapkan sebelumnya. Belum terpenuhinya target produksi daging ruminansia lokal juga disebabkan karena produksi daging ruminansia lokal dihitung berdasarkan jumlah pemotongan,

sementara jumlah pemotongan juga berkaitan dengan permintaan pasar. Jadi walaupun populasi ternak tersedia untuk dipotong untuk memenuhi permintaan pasar tapi kalau daya beli masyarakat rendah untuk membeli daging maka pemotongan ternak akan berkurang yang tentu saja akan mengurangi jumlah produksi daging. Keadaan perekonomian yang melemah selama tahun 2020 akibat pandemi covid19 ikut mempengaruhi permintaan daging segar akibat daya beli masyarakat yang menurun dan juga akibat banyaknya acara perayaan Hari Raya keagamaan tidak dapat dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya dan banyaknya bisnis kuliner yang tutup akibat diterapkannya pembatasan aktifitas yang melibatkan banyak orang.

Pada perjanjian kinerja dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, target produksi daging ruminansia dihitung berdasarkan jumlah pemotongan yang dilaporkan oleh Petugas Data di setiap kabupaten/kota. Penghitungan pemotongan ternak tidak hanya pemotongan ternak yang dibudiyakan di Provinsi Riau tapi termasuk juga data pemotongan ternak yang didatangkan dari Luar Provinsi Riau sehingga target produksi daging yang diperjanjikan dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan jauh lebih besar dibanding target produksi daging yang diperjanjikan dengan Gubernur Riau.

Adapun produksi daging ruminansia secara keseluruhan untuk ternak sapi, kerbau dan kambing dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Gambar 3.2. Grafik Produksi daging ruminansia

Tabel.3.5. Produksi daging ruminansia (dari ternak lokal dan dari luar daerah)

No.	Jenis	Tahun (Kg)						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi Potong	9.297.618	8.676.703	9.396.286	7.700.427	9.792.531	8.379.100	8.441.524
2	Kerbau	1.839.675	1.813.239	2.074.966	1.579.985	1.868.530	1.689.403	1.686.257
3	Kambing	620.342	648.242	652.278	729.620	826.614	685.156	699.991
JUMLAH		11.757.635	11.138.184	12.123.530	10.010.032	12.487.675	10.753.659	10.827.773

Dari Tabel 3.5. dapat dilihat bahwa produksi daging ruminansia di Riau sebanyak 10.827.773 (10.827,8Ton). Sementara berdasarkan Tabel 3.2. Produksi daging ruminansia lokal sebanyak 1.470 Ton. Jadi dapat disimpulkan bahwa Provinsi Riau baru bisa memenuhi produksi daging ruminansia local sekitar 13,58% dari total produksi daging ruminansia, selebihnya merupakan produksi daging dari pemotongan tenak yang didatangkan dari luar Provinsi Riau.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan, Kawin alam dan transfer Embrio) dan pendistribusian ternak kepada masyarakat.

Peningkatan populasi juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

Dari hasil upaya peningkatan populasi dapat diuraikan jumlah populasi pada gambar berikut:



Gambar 3.3. Grafik Populasi Ternak Ruminansia

Dari gambar 3.3. dapat dilihat grafik trend jumlah populasi cenderung meningkat sebagai hasil dari pelaksanaan optimalisasi reproduksi terutama melalui Inseminasi Buatan. Pada populasi Sapi dari tahun 2015-2017 meningkat menjadi 238.190 ekor. Namun pada tahun 2018 terjadi pengurangan jumlah populasi karena adanya rilis data populasi dari BPS berdasarkan angka Sutas (Survei pertanian antar sensus) yang mana data yang digunakan harus data yang dirilis oleh BPS. Selanjutnya dari data Sutas tahun 2018, Dinas Peternakan melakukan pendataan populasi *by name by address* sehingga data jumlah populasi 2019 dan seterusnya dapat lebih valid lagi. Dari pendataan populasi tahun 2018 hingga 2020 juga terlihat adanya peningkatan jumlah populasi ternak.

Pada tahun 2020 dalam upaya peningkatan populasi dan produksi daging, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan target kelahiran melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi kawin alam (Inka) sebanyak 37.270 ekor. Sampai dengan bulan Desember 2020 telah lahir sebanyak 27.071 ekor atau 72,69% dari target. Realisasi kelahiran tahun 2020 tidak tercapai 100% karena pelaksanaan IB tergantung dari kesiapan ternak (waktu birahi ternak) dan pelaksanaan IB tidak serentak sehingga yang sudah di IB sebagian masih bunting dan akan lahir pada tahun 2021.

Tabel 3.6. Target Dan Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Untuk Peningkatan Populasi Dan Produksi

No	Kabupaten	Target Akseptor IB	Capaian Akseptor IB	Persentase	Target Bunting	Capaian bunting	Persentase	Target Lahir IB dan Inka	Capaian lahir	Persentase
1	KUANSING	6,160	5,689	92.35%	4,312	4,242	98.38%	6,152	5,516	89.66%
2	INDRAGIRI HULU	5,900	5,905	100,08 %	4,130	3,912	94.72%	6,197	3,181	51.33%
3	INDRAGIRI HILIR	890	811	91.12%	623	410	65.81%	663	401	60.48%
4	PELALAWAN	1,600	1,612	110,75%	1,120	1,902	169.82%	2,469	2,326	94.21%
5	SIAK	3,000	3,122	104,07%	2,100	3,676	175.05%	3,770	3,338	88.54%
6	KAMPAR	6,000	6,407	106,78%	4,200	5,207	123.98%	7,279	6,193	85.08%
7	ROKAN HULU	7,000	5,402	77.17%	4,900	4,334	88.45%	5,903	3,479	58.94%
8	ROKAN HILIR	1,000	860	86.00%	700	388	55.43%	837	488	58.30%
9	BENGKALIS	2,500	2,057	82.28%	1,750	1,229	70.23%	2,589	1,287	49.71%
10	KEP MERANTI	250	125	50.00%	175	89	50.86%	328	103	31.40%
11	PEKANBARU	200	74	37.00%	140	52	37.14%	253	24	9.49%
12	DUMAI	1,000	942	94.20%	700	708	101.14%	800	735	91.88%
	Total	35,500	33,006	92.97%	24,850	26,149	105.23%	37,240	27,071	72.69%

Sumber Data : iSIKHNAS 2020, data diolah

Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa target akseptor IB sebanyak 35.500 ekor sekitar separuh dari populasi betina produktif yang ada di Provinsi Riau yang saat ini mencapai jumlah 63.834 ekor. Dari target 35.500 ekor yang akan di IB, terealisasi IB nya sebanyak 33.006 ekor sapi. Dan dari 33.006 ekor sapi yang di IB pada tahun 2020 yang telah berhasil bunting selama tahun 2020 sebanyak 26.149 ekor. Pada tahun 2020 ditargetkan akan lahir 37.240 ekor yang merupakan hasil dari Inseminasi Buatan dan Kawin alam. Dari 37.240 ekor yang ditargetkan akan lahir, sampai dengan akhir Desember 2020 terealisasi sebanyak 27.071 ekor, selebihnya ternak yang saat ini bunting diperkirakan akan melahirkan pada tahun 2021.

Dalam upaya peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau didukung dari anggaran APBD Riau dan dari APBN dalam bentuk *sharing budget* untuk pembelian semen beku, Fasilitas alat dan bahan IB, Pengadaan N2 Cair, Operasioanal N2 Cair, Operasional IB, Operasional Pemeriksaan Kebuntingan, Operasional Kelahiran, Pembelian hormon dan viatamin, dan belanja jasa kegiatan lainnya.

Selain bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak kegiatan IB juga diharapkan memberikan dampak ekonomi. Dampak ekonomi kegiatan IB dihitung dari nilai jual pedet lepas sapih (umur 6 bulan), dimana harga rata-rata pedet lepas sapih sebesar Rp 6 juta rupiah, jika dikalikan dengan jumlah

kelahiran 27.071 ekor, maka dampak ekonomi yang dihasilkan kegiatan IB sebesar Rp

162.426.000.000,- Sementara input pelaksanaan IB dengan perkiraan biaya IB untuk 33.006 akseptor termasuk obatan-obatan dan operasional IB sebesar Rp 18.483.360.000,-.

Selain dampak terhadap investasi, pelaksanaan IB juga memberikan dampak lain seperti: peningkatan lapangan kerja baru tenaga teknis bidang peternakan (inseminator dan paramedik) di pedesaan, meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam usaha peternakan sapi dengan adanya insentif pelayanan.

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan populasi melalui IB diantaranya jangkauan pelayanan yang sangat luas dengan jarak tempuh yang jauh bagi Petugas IB untuk dapat mendatangi ternak yang akan di IB. Kendala lainnya yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan peternak dalam mengenal tanda-tanda birahi pada ternaknya dan tidak jarang peternak terlambat mengetahui ternaknya yang dalam keadaan birahi sehingga sewaktu memanggil Petugas IB dan Petugas IB telah datang, ternak yang akan di IB sudah tidak dalam keadaan birahi sehingga IB tidak dapat dilakukan.

Keberhasilan kebuntingan baik yang dari inseminasi buatan maupun kawin alam tidak terlepas juga dari pemenuhan pakan ternak yang berkualitas. Kebanyakan ternak dipelihara dengan pemberian pakan yang seadanya tanpa memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak untuk dapat bunting dan melahirkan. Hal ini terkait juga dengan pengetahuan peternak yang masih minim tentang pakan ternak yang berkualitas dan keterbatasan modal peternak untuk membeli pakan ternak yang berkualitas.

Dalam mengukur kinerja program dan kegiatan yang berkaitan dalam pencapaian peningkatan produksi daging, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah menggunakan aplikasi iSHIKHNAS yang datanya realtime dilaporkan oleh Petugas Lapangan. Berbagai data dari hasil pelaporan Petugas Lapangan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan yang mendukung kebijakan dan Program Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dengan adanya aplikasi iSHIKHNAS, data jumlah ternak yang di IB, data ternak yang bunting, data jumlah populasi, data pemotongan ternak yang berkaitan langsung

dengan produksi daging serta data lainnya yang berkaitan dengan peternakan dan Kesehatan hewan yang dilaporkan oleh Petugas, dapat di akses kapan saja dan data terupdate setiap saat.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dimana Petugas Lapangan yang seharusnya melaporkan dan mengupdate data setiap selesai pelayanan kadang tidak melakukan update data secara disiplin sehingga realisasi capaian yang diaporkan lebih sedikit daripada kenyataan di lapangan.

Dalam menghadapi kendala peningkatan populasi ternak untuk meningkatkan produksi daging, solusi yang telah dilakukan diantaranya adalah :

- Untuk mengatasi luasnya jangkauan pelayanan IB oleh Petugas, maka dilakukan sentralisasi atau intensifikasi IB melalui zonasi sentra pengembangan ternak.
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Petugas IB, Petugas PKB dalam memberikan pelayanan IB, PKB dan penanganan gangguan reproduksi ternak
- Melakukan sinkronisasi IB, dimana ternak-ternak sapi dikumpulkan pada suatu tempat dan dilakukan IB secara serentak
- Memberi pembinaan terhadap kelompok untuk penerapan prinsip-prinsip sistem perbibitan ternak
- Memberikan pembinaan dan pemantauan kepada peternak/kelompok akan penting pakan dalam usaha budidaya ternak.
- Penambahan petugas teknis peternakan sehingga petugas dapat membina kelompok secara maksimal
- Peningkatan biaya operasional pelaporan Petugas sehingga petugas pelaksana pelapor termotifasi untuk melaporkan data secara realtime melalui iSHIKHNAS.

Permasalahan lain yang menyebabkan lambatnya peningkatan produksi daging ruminansia lokal di Provinsi Riau adalah dikarenakan :

- Adanya pemasukan daging beku dari luar provinsi ataupun dari luar negeri yang harganya jauh lebih murah dibanding daging sapi lokal menyebabkan melemahnya keinginan peternak lokal maupun RPH menjual dan memotong ternaknya sehingga berpengaruh juga pada jumlah produksi daging lokal.

- Usaha peternakan sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah (penguasaan teknologi dan informasi peternakan yang kurang). Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif sehingga produktivitas tidak optimal.
- Terbatasnya ketersediaan pakan ternak berkualitas. Budidaya bahan baku pakan dan pengolahan pakan masih terbatas hanya skala rumah tangga oleh masyarakat peternak lokal. Tingginya harga bahan baku tambahan pakan seperti obat, vitamin dan mineral yang tidak bisa dijangkau secara langsung oleh peternak. Peternak lokal dengan keterbatasan biaya pengadaan pakan hanya mengambil langkah alternatif lain yaitu dengan tetap mempertahankan cara pengolahan pakan secara tradisional dan konvensional tanpa didukung pengetahuan dan teknologi terkini dan modern.
- Adanya ancaman penyakit menular yang berpotensi menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya (Zoonosis).

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menunjang peningkatan produksi daging ruminansia lokal serta mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan:

- Memprioritaskan pengembangan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang diarahkan pada perbaikan mutu bibit ternak, pengembangan pakan ternak yang murah dan berkualitas, peningkatan pelayanan kesehatan hewan serta melakukan pengawasan dan pengujian kualitas produk asal hewan.
- Memacu kegiatan IB melalui optimalisasi akseptor, dan penguasaan teknologi Inseminasi Buatan, melengkapi sarana dan prasarana inseminasi buatan serta sinkronisasi IB.
- Memberikan bantuan pakan ternak, dan atau fasilitasi pelatihan bagaimana menyediakan pakan ternak berkualitas dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.
- Mengembangkan sistem integrasi ternak tanaman terutama ternak sapi dan sawit dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani berupa upaya

peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan limbah tanaman sebagai pakan lokal dan pemanfaatan limbah ternak dalam bentuk padat dan cair.

- Pengembangan SDM dan kelembagaan agribisnis peternakan
- Peningkatan peran swasta dalam pengembangan sapi potong di lahan perusahaan perkebunan sawit melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) untuk meningkatkan populasi sapi potong sehingga ketersediaan daging sapi lokal di Riau dapat terpenuhi

3.1.4.2. INDIKATOR PERSENTASE STATUS KESEHATAN HEWAN

Indikator persentase status kesehatan hewan digunakan untuk mengukur kinerja sasaran strategis dinas yang II yakni sasaran meningkatnya status kesehatan hewan. Dari Tabel 3.2. dapat diketahui pada capaian Indikator Kinerja Utama yang II yakni Persentase Status Kesehatan hewan tahun 2020 adalah sebesar 94,10% dengan capaian kinerja sebesar 98,84%. Capaian ini menunjukkan hasil penilaian pada kategori sangat tinggi. Capaian diukur dengan menghitung jumlah populasi dikurangi jumlah hewan yang sakit dibagi dengan jumlah populasi dikali 100%.

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung peningkatan persentase status kesehatan hewan diantaranya adalah dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengamatan penyakit hewan, pemenuhan sarana prasarana kelembagaan (Puskeswan) dan SDM Kesehatan Hewan dan pengawasan obat hewan.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan telah dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular prioritas Provinsi Riau yakni Jembrana, Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Antraks, Hog Cholera, Helminthiasis dan parasit darah. Dalam mencegah dan memberantas berbagai penyakit tersebut diantaranya dengan melakukan vaksinasi, pemberian

obat-obatan dan pengawasan ketat lalu lintas ternak yang berasal dari wilayah endemi.

Pelayanan kesehatan hewan di lapangan dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang merupakan pelayanan kesehatan hewan terpadu pada tingkat lapangan dilaksanakan oleh tenaga medis, para medis, petugas lapangan atau kecamatan yang sekaligus menjadi ujung tombak dalam pemberian pelayanan kesehatan hewan. Sasaran pelayanan kesehatan hewan terpadu antara lain ternak sebagai objek pelayanan dengan lebih diutamakan pada ternak-ternak milik petani yang tergabung dalam kelompok petani ternak di wilayah inseminasi buatan serta masyarakat penerima paket-paket bantuan ternak pemerintah lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pengetahuan mengenai kegiatan surveilans kesehatan hewan sangat penting untuk petugas kesehatan hewan disemua tingkatan guna menentukan langkah pengambilan kebijakan dalam pencegahan, pengendalian dan atau pemberantasan penyakit hewan. Dengan adanya iSIKHNAS petugas kesehatan hewan disemua tingkatan menjadi lebih mudah dalam menjalankan tugasnya dan memudahkan dalam pelaporan serta pengambilan kebijakan. ISIKHNAS merupakan sistem pelayanan informasi dan pelaporan terpadu bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan produksi peternakan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi. Dengan iSIKHNAS petugas dapat melaporkan secara realtime, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui situasi penyakit yang ada di lapangan secara cepat. Selain pelaporan penyakit hewan, iSIKHNAS juga memfasilitasi pelaporan pematangan, IB, Produksi, dan perbibitan,

No	Indikator	Tahun			Jumlah	Satuan
		2018	2019	2020		
1	Pelayanan Kesehatan Hewan	26,794	49,296	37,777	109,867	Ekor
2	Vaksinasi					
	a. Jembrana	59,618	47,909	22,180	129,707	Dosis
	b. Rabies	43,144	40,385	36,858	120,387	Dosis
	c. SE	5,313	4,848	3,488	13,649	Dosis
3	Penanggulangan Gangrep	3,724	3,811	2,026	9,111	Kasus

4	Pemeriksaan Laboratorium	76,556	75,486	112,634	264,676	Sampel
5	Status Kesehatan Hewan	89	95,5	94,1		%

Tabel. 3.7. Pelayanan Kesehatan Hewan
Sumber data : iSHIKHNAS 2020

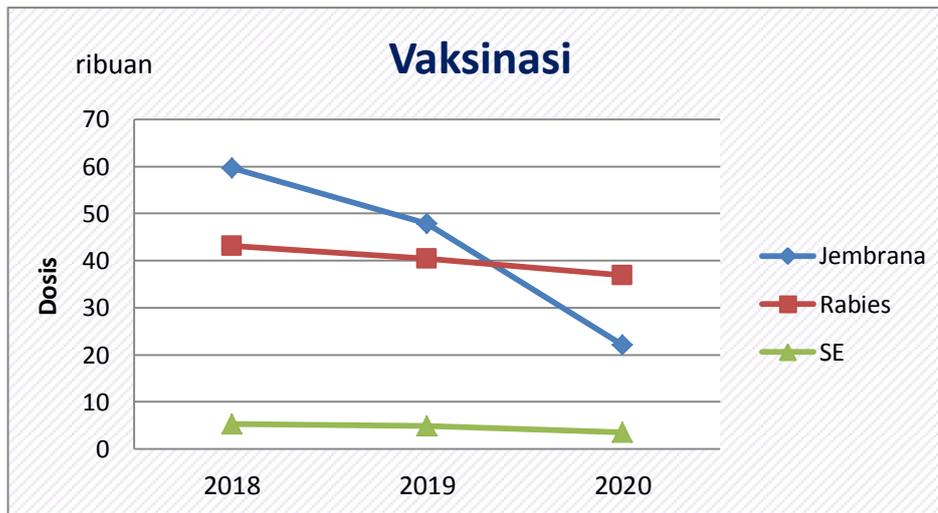
Dari tabel.3.7 dapat dilihat selama 3 tahun terakhir (2018 s.d. 2020) dalam rangka peningkatan persentase status kesehatan hewan berdasarkan laporan yang masuk ke sistem pelaporan iSIKHNAS pelayanan kesehatan telah ditangani sebanyak 109.867 ekor hewan dengan rincian jenis hewan sebagai berikut : sapi 66.538 ekor, kambing 2.4137 ekor, domba, 234 ekor, kerbau 438 ekor, babi 536 ekor, anjing 2.748 ekor, kucing 11.029 ekor, kelinci 216 ekor, monyet 35 ekor, unggas 1.388 ekor, dan hewan lain 2.568 ekor. Sebanyak 102.815 ekor sembuh, 7.051 ekor sakit, 3.809 mati.

Vaksinasi terhadap sejumlah penyakit antara lain penyakit Jembrana, Rabies, dan Septicemia Epizooticae telah dilaksanakan selama 3 tahun terakhir dengan rincian Sebanyak 129.707 dosis vaksin Jembrana pada Sapi Bali, 120.387 dosis vaksin Rabies pada hewan penular Rabies (anjing, kucing kera) , dan 13.649 dosis SE pada sapi dan kerbau telah dilaksanakan dalam 3 tahun terakhir.

Penanggulangan gangguan reproduksi yaitu kegiatan yang bertujuan menanggulangi gangguan reproduksi pada sapi dan kerbau agar ternak dapat bereproduksi kembali. Selama 3 tahun terakhir telah ditangani sebanyak 9.111 kasus gangguan reproduksi. Sebanyak 80% kasus gangguan reproduksi dinyatakan sembuh.

Pemeriksaan laboratorium adalah kegiatan dalam rangka peneguhan diagnosa dan surveilans penyakit hewan. Selama 3 tahun terakhir telah dilaksanakan pengujian sampel sebanyak 264.676 sampel di unit pelaksana teknis laboratorium veteriner.

Rincian pelaksanaan dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.4. Grafik Vaksinasi Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2018-2020

Dari gambar 3.4 dapat dilihat jumlah vaksinasi yang dilakukan terhadap hewan per tahun mulai tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2018 pelaksanaan vaksin lebih banyak dilakukan dikarenakan pada tahun tersebut kasus penyakit jembrana masih ada sehingga perlu dilakukan vaksinasi yang lebih intens untuk mencegah meledaknya kasus penyakit jembrana seperti pada tahun 2016-2017.

Bila dicermati secara keseluruhan, upaya meningkatkan status kesehatan hewan tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya target adalah :

- a. Posisi Provinsi Riau yang strategis serta lalu lintas barang dan orang yang semakin ramai lancar sehingga Provinsi Riau merupakan daerah yang cukup rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik.
- b. Kasus penyakit hewan menular strategis seperti Rabies, AI, Jembrana, dan penyakit lainnya berfluktuasi tingkat kejadiannya, hal ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca, lalu lintas yang tidak terpantau dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan kesayangannya.
- c. Belum optimalnya pelayanan puskesmas sesuai dengan ketentuan yang ada (Permentan No. 64 tahun 2007) yang disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas puskesmas baik medis maupun paramedis, sarana obat hewan dan kendaraan operasional yang belum memadai serta luasnya wilayah yang menjadi daya jangkau kerja bagi petugas.

- d. Semakin meningkatnya arus lalu lintas ternak yang ramai lancar dan sulit dipantau ke Provinsi Riau baik antar provinsi dan kabupaten/kota sehingga Provinsi Riau rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular dari daerah lainnya, hal ini terkait dengan minimnya petugas baik secara kualitas maupun kuantitas serta masih terbatasnya area cek point pada masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan pada kabupaten/kota yang telah memiliki area cek point, tidak dapat difungsikan secara optimal.
- e. Masih kurangnya jumlah petugas puskesmas di kabupaten/kota, sehingga diperlukan adanya penambahan penempatan Tenaga Harian Lepas (THL) baik medis maupun paramedis dari pusat di kabupaten/kota masih kurang.
- f. Mengingat terjadinya penularan rabies pada daerah yang bebas, hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan pada pintu masuk (cek point) juga karena banyaknya peluang kemungkinan masuknya ternak atau hewan melalui pelabuhan yang tidak resmi.

Alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan petugas PPV di lapangan melalui SMS Gateway dan iSIKHNAS, sehingga informasi penyakit dapat diketahui dengan cepat, seperti Rabies, AI dan SE yang berkaitan dengan kondisi kurang mendukung seperti banjir dan serta cuaca ekstrem dengan penyampaian pelaporan penyakit dikirimkan dengan tepat waktu atau realtime.
- b. Dalam upaya memenuhi jumlah dan kualitas petugas, diupayakan merekrut tenaga harian lepas baik dari pusat dan daerah serta melatih petugas yang ada dalam bidang teknis keswan
- c. Keterbatasan SDM diupayakan melalui penerimaan tenaga medis dan non medis yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota kabupaten/kota serta dropping THL dari pusat.
- d. Dalam upaya meningkatkan kemampuan SDM dilapangan, maka dilakukan pelatihan-pelatihan, magang, pertemuan teknis dibidang kesehatan hewan.
- e. Dalam penyediaan sarana prasarana dibidang keswan, maka diharapkan kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten/Kota, disamping sharing melalui anggaran APBD Provinsi dan

APBN pusat, untuk itu perlu koordinasi dan informasi yang baik sehingga kegiatan pelayanan keswan dapat berjalan dengan baik.

- f. Dalam upaya mempertahankan atau mencegah masuknya Penyakit Hewan Menular (PHM) baik dari antar provinsi, antar pulau, dan antar kabupaten/kota, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pemasukan ternak yang masuk ke wilayah Provinsi Riau dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis serta melakukan pengujian kembali melalui pemeriksaan laboratorium terhadap ternak tersebut.
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas perhubungan, karantina, Polri dalam hal pengawasan lalu lintas ternak dan upaya penanggulangan penyakit di area cek point perbatasan.
- h. Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan hewan melalui puskeswan, maka diupayakan peningkatan sarana puskeswan, SDM (medis, paramedis, Vaksinator, ATR), obat-obatan, kendaraan operasional yang diupayakan melalui anggaran APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN Pusat.
- i. Merintis pembebasan bagi daerah-daerah yang berpotensi untuk dibebaskan penyakit secara bertahap serta melakukan kajian analisa resiko terhadap daerah yang dibebaskan.

3.1.5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Produksi Daging Ruminansia Lokal sesuai Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai target yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja yakni pada sasaran strategis meningkatnya produksi daging dengan Indikator Kinerja Angka produksi daging ruminansia lokal pencapaiannya ditunjang dari program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program ini yang turut mendukung pencapaian peningkatan produksi daging adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8. Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis ke-1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	
												Rp	%
1	Meningkatnya Produksi Daging	Angka Produksi Daging Ruminansia Lokal	1.796 Ton	1.470 Ton	81,85%	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi Ternak	501.632 ekor	497.874 ekor	99,25%	6.242.973.155	5.786.869.955	92,69
						Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah Ternak yang Di Inseminasi Buatan (IB) (Ekor)	27500 Ekor	33.006 Ekor	120%	1.155.548.000	989.246.775	85,61
						Pengembangan Produksi Semen Beku	Jumlah produksi Semen Beku (Dosis)	24000 Dosis	32023 Dosis	133,43%	663.065.221	619.027.323	93,36
						Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan Inseminasi Buatan Ternak	Jumlah sarana dan prasarana produksi Inseminasi Buatan Ternak (Unit)	9 Unit	9 Unit	100%	602.809.949	539.490.203	89,50
						Penguatan Pembibitan Ternak	Jumlah Ternak yang ber SKLB (Ekor)	50 Ekor	50 Ekor	100%	232.845.000	208.014.500	89,34
						Pembinaan Ternak Ruminansia	Jumlah Petugas Lapangan Teknis Peternakan (Orang Bulan)	847 Orang Bulan	847 Orang Bulan	100%	1.133.230.000	1.123.526.000	99,14
						Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah ternak yang disalurkan untuk model integrasi (Ekor)	0 Ekor	0 Ekor		38.590.000	31.860.000	82,56
						Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah ternak yang dipelihara (Ekor)	150 Ekor	150 Ekor	100%	476.995.000	467.573.815	98,02
						Pendistribusian Ternak Sapi kepada Masyarakat	Jumlah ternak sapi yang didistribusikan (Ekor)	0 Ekor	0 Ekor		69.750.000	56.648.000	81,22
						Verifikasi Lokasi dan Kelompok Peternakan	Jumlah kelompok yang diverifikasi (Kelompok)	170 Kelompok	281 Kelompok	165,29%	150.000.000	134.512.500	89,68
						Pengembangan Pakan Ternak	Jumlah unit pengolahan pakan (unit)	0 Unit	0 Unit		24.700.000	21.495.000	87,02
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pakan Ternak	Jumlah sarana prasarana UPT.Laboratorium Pakan Ternak (Unit)	5 Unit	5 Unit	100%	946.558.485	917.251.348	96,90
						Pengembangan dan Penyediaan Pakan Ternak	Jumlah produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT) (Ton)	1080 Ton	1080 Ton	100%	433.416.500	417.640.000	96,36
						Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Peternakan	Jumlah Petani dan Pelaku Usaha yang dilatih (Orang)	0 Orang	0 Orang		9.150.000	7.884.000	86,16
						Pengawasan dan Penerapan NKV dan Peredaran PAH	Jumlah unit usaha yang menerapkan NKV (Unit Usaha)	17 Unit Usaha	22 Unit Usaha	129,41%	190.775.000	152.065.491	79,71
						Peningkatan Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi	Jumlah unit pengolahan limbah ternak sapi (Unit)	0 Unit	0 Unit		23.940.000	17.475.000	72,99
						Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau	Jumlah Polis Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) (Polis)	2000 Polis	1878 Polis	93,9%	91.600.000	83.160.000	90,79

Dari Tabel 3.8. terlihat bahwa **untuk meningkatkan produksi daging ruminansia lokal maka program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.**

Outcome yang diharapkan dari Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan adalah peningkatan jumlah populasi ternak yang secara langsung akan meningkatkan produksi daging. Penambahan populasi ternak dapat dilakukan melalui penambahan kelahiran baik yang berasal dari Inseminasi Buatan ataupun yang berasal dari kawin alam. Pada tahun 2020 terjadi penambahan kelahiran sapi sebanyak 27.071 ekor baik yang berasal dari Inseminasi Buatan maupun dari kawin Alam.

Pada tahun 2020 capaian sasaran strategis angka produksi daging ruminansia lokal belum mencapai target 100%, capaiannya baru mencapai 81,85%. Namun bila dibandingkan dengan produksi daging tahun 2019, produksi daging ruminansia lokal mengalami kenaikan 34,99% yang menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menunjukkan hasil dalam meningkatkan produksi daging ruminansia lokal. Kegiatan-kegiatan yang ada pada Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan hampir seluruh kegiatan capaian kinerjanya mencapai 100% malah terdapat 4 kegiatan yang capaian kinerjanya melebihi 100%, hanya satu kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah 100% yakni pada Kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau yang capaiannya 93,90%.

Dengan capaian kinerja yang tinggi dari masing-masing kegiatan dalam Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan memberikan pengaruh dalam peningkatan produksi daging. Contohnya pada kegiatan Pengembangan Inseminasi Buatan yang capaian kinerjanya mencapai 120%. Kegiatan ini memberi pengaruh yang besar pada penambahan populasi ternak karena dengan adanya Inseminasi Buatan membantu peternak yang memiliki sapi betina produktif menjadi bunting walaupun tidak memiliki sapi jantan.

Pada sasaran strategis Meningkatnya status Kesehatan hewan dengan indikator persentase status Kesehatan hewan capaian kinerjanya didukung oleh Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Adapun kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Program/Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Status Kesehatan Hewan (Sasaran Strategis Ke-2)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	
												Rp	%
2	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Persentase Status Kesehatan Hewan	95,2	94,1	98,84%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Angka Kematian Ternak (%)	3,4%	2,5%	126%	4.098.981.478	3.473.924.724	84,75
						Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT RSH	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan (Unit)	17 Unit	17 Unit	100%	500.674.478	356.841.872	71,27
						Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan (Klinik UPT RSH)	Jumlah Pelayanan (Ekor)	2744 Ekor	7244 Ekor	263,99%	1.205.837.000	1.158.523.672	96,08
						Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah Ternak yang Dilayani (Ekor)	35000 Ekor	35000 Ekor	100%	1.872.470.000	1.533.505.680	81,90
						Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan	Jumlah kasus yang ditanggulangi (Kasus)	2200 Kasus	1728 Kasus	78,54%	520.000.000	425.053.500	81,74

Dari Tabel 3.9 dapat dilihat bahwa dalam rangka meningkatkan status Kesehatan hewan, didukung dengan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan indikator angka kematian ternak. Capaian kinerja Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sangat tinggi mencapai 126%. Target angka kematian ternak tahun 2020 sebesar 3,4% dengan realisasi angka kematian ternaknya sebesar 2,5%. Dalam arti angka kematian ternak dapat diturunkan melebihi target karena semakin sedikit angka kematian ternak maka capaian kinerja semakin bagus. Pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan, hampir seluruh kegiatannya mencapai target yang telah ditetapkan bahkan ada kegiatan realisasinya jauh melebihi target. Hanya satu kegiatan yang capaiannya dibawah target yakni pada kegiatan Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan. Selebihnya kegiatan mencapai target malah terdapat kegiatan yang capaiannya melebihi target yakni kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan yang capaiannya 263,99%. Dengan capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan maka status Kesehatan hewan dapat ditingkatkan.

Disamping Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga didukung oleh Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat yang berasal dari anggaran APBN yang terdiri dari Kegiatan :

- Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan
- Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak
- Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH
- Kegiatan Pengembangan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.

Semua kegiatan ini memiliki capaian kinerja 100%.



Gambar 3.5. Penerimaan Sertifikat ISO 9001 UPT. Inseminasi Buatan Ternak



Gambar 3.5. Pengecekan Semen Beku yang selanjutnya di salurkan ke Kabupaten/kota untuk Inseminasi Buatan



Gambar 3.7. Pelaksanaan Vaksinasi Rabies Gratis dalam rangka *World Rabies Day*



Gambar 3.8. Pengambilan Sampel RBT



3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 alokasi dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebesar Rp.48.741.334.529,61. Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi Rp.30.751.679.470,- dengan rincian Belanja Langsung sebesar **Rp.14.664.078.062,-** dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.16.087.601.408,- .

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 didasarkan pada realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada tahun 2020 memperoleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 14.664.078.062,-.

Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp.13.379.986.663 atau sebesar 91,24% dengan rincian per program seperti tercantum dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020

PROGRAM		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
A	UTAMA	10.341.954.633	9.260.794.679	89,55%
1	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	6.242.973.155	5.786.869.955	92,69%
2	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	4.098.981.478	3.473.924.724	84,75
B	PENUNJANG	4.322.123.429	3.994.005.836	91,42%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.819.451.361	3.631.638.346	95,08%
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	502.672.068	487.553.638	96,99%
	TOTAL (A+B)	14.664.078.062	13.379.986.663	91,24%

Dari anggaran yang ada pada dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat bahwa program yang paling besar anggarannya adalah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan sebesar Rp 6.242.973.15,- dengan serapan anggaran 92,69%. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan anggaran Rp 4.098.981.478,- dan serapan 84,75%.

Disamping dana dari APBD Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga memperoleh dana untuk pembangunan peternakan dan kesehatan yang berasal dari dan APBN dalam bentuk Tugas Pembantuan. Adapun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020

No	Program/ Kegiatan	Output	Pagu (Rp. 000)	Target			Realisasi		
				Fisik (%)	Keu (Rp. 000)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (Rp. 000)	Keu (%)
I	Pemenuhan Pangan Asal Ternak Dan Agribisnis Peternakan Rakyat		4.976.394	100	4.976.394	100	100	4.888.542,515	98,23%
1.	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	10 Ha	383.883	100	378.282	100	100	378.282	98,54%
2.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	42.000 Dosis	1.228.100	100	1.228.100	100	100	1.203.353,68	97,98%
3.	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	32.580 akseptor	2.569.072	100	2.569.072	100	100	2.547.322,59	99,15%
4.	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	3 unit usaha	146.802	100	146.802	100	100	135.000,572	91,96%
5.	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	3 lokasi	181.982	100	181.982	100	100	178.133,30	97,89%
6.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 layanan	466.555	100	466.555	100	100	446.450,373	95,69%

Pada Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa realisasi fisik pada Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat yang didanai oleh APBN melalui Tugas Pembantuan menunjukkan hasil yang memuaskan dengan capaian 100% dan serapan anggarannya mencapai 98,23%. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Provinsi Riau tahun 2020 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, dengan kegiatan:

- a) Peningkatan Produksi Pakan Ternak, pagu anggaran Rp383.883.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp 378.282.000,- atau 98,54% dengan realisasi fisik 100%.
- b) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, pagu anggaran 2.569.072.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp .547.322.590,- atau 99,15% dan realisasi fisik 100%.
- c) Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak, pagu anggaran Rp 2.569.072.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp 2.547.322.590,- atau 99,15% dan fisik 100%.
- d) Peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), pagu anggaran Rp 447.000.000,- dengan realisasi keuangan mencapai 426.751.000,- atau 95,47% dan fisik 100%.
- e) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan, pagu anggaran Rp 446.555.000,- dengan realisasi keuangan mencapai 446.450.373,- atau 95,69% dan fisik 100%.
- f) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak, pagu anggaran Rp 181.982.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp 178.133.300,- atau 97,89% dan fisik 100%.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*). Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2020. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran strategis, dengan dua indikator kinerja utama diketahui bahwa pada sasaran strategis Meningkatnya produksi daging ruminansia dengan indikator angka produksi daging ruminansia lokal menunjukkan hasil kinerja yang tinggi dengan persentase capaian kinerja produksi daging sapi lokal 81,85%, Sedangkan pada sasaran strategis meningkatnya status kesehatan hewan dengan indikator kinerja utama persentase status Kesehatan hewan menunjukkan capaian kinerja termasuk pada kategori Sangat Tinggi dengan capaian kinerja 98,84%. Walaupun capaian kinerja sudah tinggi tapi masih harus terus dilakukan peningkatan hingga capaian kinerja 100% atau bahkan lebih dari 100%.
2. Permasalahan utama dalam peningkatan produksi daging adalah kurang dan lambatnya pertumbuhan populasi ternak akibat angka kelahiran ternak yang masih rendah sebagai akibat belum maksimalnya upaya peningkatan kelahiran melalui Inseminasi Buatan dan Kawin Alam akibat keterbatasan jumlah SDM dan sarana prasarana serta belum diterapkannya GFP oleh peternak akibat keterbatasan pengetahuan dan modal peternak dalam menerapkan GFP.

3. Permasalahan utama dalam pengendalian penyakit ternak/hewan adalah karena kurang terpantaunya lalul lintas ternak dari daerah/provinsi lain sehingga resiko masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik dari daerah/provinsi lain semakin besar dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan kesayangannya.

4.2. Saran Tindak Lanjut

Upaya/saran tindak lanjut yang dilakukan diantaranya adalah :

1. Untuk mengantisipasi lambatnya laju pertumbuhan populasi khususnya sapi potong maka perlu pembenahan dalam sistem perbibitan. Untuk itu perlu peningkatan kerjasama dengan pihak perkebunan dan agroindustri perkebunan sebagai sumber bahan pakan dan Kawasan pengembangan peternakan yang difasilitasi pemerintah daerah dan didukung oleh pemerintah pusat. Disamping itu perlu juga peningkatan kemampuan SDM peternak dan aparat Pembina, peningkatan peran dan fungsi kelembagaan peternak, serta peningkatan fasilitas penunjang peternakan dalam rangka pengembangan peternakan khususnya dalam penyediaan bibit dan bakalan.
2. Dalam upaya mencegah masuknya Penyakit Hewan Menular (PHM) baik dari antar provinsi, antar pulau, dan antar kabupaten/kota, maka perlu ditingkatkan pengawasan yang ketat terhadap pemasukan ternak yang masuk ke wilayah Provinsi Riau dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis serta melakukan pengujian kembali melalui pemeriksaan laboratorium terhadap ternak tersebut.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas perhubungan, karantina, Polri dalam hal pengawasan lalu lintas ternak dan upaya penanggulangan penyakit di area cek point perbatasan.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. RAHMAT SETIYAWAN
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SYAMSUAR
Jabatan : Gubernur Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA,
SYAMSUAR

Pekanbaru, September 2020

PIHAK PERTAMA,
Dh. RAHMAT SETIYAWAN
Pembina TK.I
NIP. 19700304 199903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produksi daging	Angka produksi daging ruminansia lokal	1.796 Ton
2	Meningkatnya status kesehatan hewan	Persentase status kesehatan hewan	95,2 %

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.819.451.361,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	502.672.068,00	APBD
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	4.098.981.478,00	APBD
4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	6.242.973.155,00	APBD
5	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	4.976.394.000,00	APBN



PIHAK KEDUA

SYAMSUAR



Pekanbaru, September 2020
PIHAK PERTAMA

drh. RAHMAT SETIYAWAN

Pembina TK.I

NIP. 19700304 199903 1 004



KEMENTERIAN PERTANIAN

SERTIFIKAT penghargaan



diberikan kepada

*Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Riau*

atas prestasinya
sebagai wilayah dengan performa terbaik atas
pelaporan kasus rabies melalui ISIKHNAS



Masrullah, M.Sc.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

2020